

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Adjie, H. (2019). Pemahaman Terhadap Bentuk Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (SKMHT) Edisi Revisi.

Dalam, R. P. S., Di Indonesia, P. K., Afhami, H. S., & SH, M. HUKUM PERJANJIAN KREDIT.

Husin., (2022). *Aspek Legal Kredit dan Jaminan pada Bank Perkreditan Rakyat (Panduan Praktis)*. Penerbit Alumni.

Sutedi, A. (2019). *Hukum hak tanggungan*. Sinar Grafika.

Soenaryo, C. (2023). *Kewenangan dan tanggung jawab notaris dalam konteks pelayanan hukum di Indonesia*. USU Press.

Usman, R. (2024). Hukum jaminan Kebendaan Tanah (Hak Tanggungan).

B. JURNAL

Cahayani, S. E. (2019). Pembuatan Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Tanpa Diikuti Akta Pemberian Hak Tanggungan. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 3(1), 29-45.

Iroth, P. P. D. (2017). Perjanjian Kredit Bank Sebagai Dasar Hubungan Hukum Antara Bank dan Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. *Lex Et Societatis*, 5(5).

- Jayantara, I., Krisna, P. A., & Sudiarawan, K. A. (2023). Kekuatan Hukum Akta Pemberian Hak Tanggungan(APHT) yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). *Jurnal Kertha Semaya*, 12(08).
- Marindowati, M. (2007). Pendaftaran Hak Tanggungan Menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(1).
- Nurhadi, N. (2018). Pembiayaan dan kredit di lembaga keuangan. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 1(2), 14-24.
- Salim, M. (2017). Jual beli secara online menurut pandangan hukum Islam. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana dan Ketatanegaraan*, 6(2), 371-386.
- Sudarto, S., & Santoso, B. (2019). Penyelesaian kredit bermasalah pada perbankan Indonesia. *Notarius*, 12(2), 591-607.
- Takalumang, V. Y. (2018). Analisis sektor ekonomi unggulan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kepulauan Sangihe. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(01).
- Valayvi, Y. K., & Djuwityastuti, D. (2016). Jaminan Hak Tanggungan Atas Tanah Milik Pihak Ketiga Dalam Perjanjian Kredit Di Lembaga Keuangan Perbankan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan. *Privat Law*, 4(2), 164692.

Wibowo, D. C., & Gunarto, G. (2017). Pelaksanaan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) Di Kota Pekalongan. *Jurnal Akta*, 4(2), 324689.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan (Lembaran Negara RI Tahun 1996 Nomor 42, Tambahan Lembaran RI Nomor 3601)